



Pendampingan Penyelarasan Pembelajaran Akuntansi Berbasis SKKNI No. 264 Tahun 2023 pada MGMP Akuntansi Jakarta Timur II

Eneng Sugihyanty^{1*}, Amor Marundha², Safri³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 13610, Jakarta

Info Artikel

Histori Artikel:

Diajukan: 21 April 2026
Direvisi: 3 Juli 2026
Diterima: 31 Juli 2026

Kata kunci:

SKKNI,
MGMP
Pembelajaran Akuntansi
Kompetensi Kerja
Pendidikan Vokasi

Keywords:

SKKNI,
MGMP
Accounting Education
Work Competency
Vocational Education

Penulis Korespondensi:

Eneng Sugihyanty
Email:
sghyanty@yahoo.com

ABSTRAK

Perubahan kebutuhan dunia kerja menuntut pembelajaran akuntansi di sekolah menengah untuk diselaraskan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) terbaru. MGMP Akuntansi Jakarta Timur II masih menghadapi kendala dalam memahami dan mengimplementasikan SKKNI Nomor 264 Tahun 2023, khususnya terkait level okupasi dan integrasinya ke dalam pembelajaran. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman guru mengenai SKKNI, memfasilitasi penyepakatan level okupasi pembelajaran akuntansi, serta menyusun rekomendasi penyelarasan pembelajaran berbasis standar kompetensi kerja. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui *workshop*, *Focus Group Discussion* (FGD), dan pendampingan teknis. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman guru terhadap struktur SKKNI, unit kompetensi, elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, dan konsep level okupasi, serta menghasilkan kesepakatan MGMP untuk menetapkan Level II sebagai standar okupasi minimal pembelajaran akuntansi di SMK. Selain itu, dihasilkan rekomendasi penyelarasan pembelajaran yang meliputi penyesuaian perangkat ajar dengan unit kompetensi SKKNI, pengembangan asesmen berbasis kompetensi kerja, integrasi studi kasus dunia kerja, dan penguatan pembelajaran kontekstual. Evaluasi kegiatan juga menunjukkan tingkat kepuasan peserta yang tinggi, dengan 86,6% peserta memberikan penilaian sangat baik terhadap penguasaan materi narasumber. Luarar tersebut memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan MGMP dalam mendukung implementasi pembelajaran akuntansi berbasis kompetensi kerja yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

The changing demands of the labor market require accounting education at the secondary school level to be aligned with the latest Indonesian National Work Competency Standards (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia—SKKNI). The Accounting Teachers' Working Group (MGMP) of East Jakarta II continues to face challenges in understanding and implementing SKKNI Decree No. 264 of 2023, particularly regarding occupational levels and their integration into classroom instruction. This community service program aimed to enhance teachers' understanding of SKKNI, facilitate consensus on the appropriate occupational level for accounting instruction, and develop recommendations for aligning learning with industry competency standards. The program employed a participatory approach through workshops, focus group discussions (FGDs), and technical mentoring. The results indicate improved teachers' understanding of the SKKNI structure, competency units, competency elements, performance criteria, and occupational level concepts. The program also resulted in an MGMP agreement to adopt Level II as the minimum occupational standard for accounting instruction in vocational high schools and produced recommendations for curriculum alignment, including the integration of SKKNI competency units into teaching materials, the development of competency-based assessments, the incorporation of workplace case studies, and the strengthening of contextual learning practices. Participant evaluations also indicated a high level of satisfaction, with 86.6% rating the speakers' mastery of the subject matter as very good. These outcomes strengthened collaboration between higher education institutions and the MGMP in supporting the implementation of competency-based accounting education that is more closely aligned with the needs of business and industry.

Copyright © 2026 Author(s). All rights reserved

I. PENDAHULUAN

Dalam konteks pendidikan vokasi, penyelarasan antara dunia pendidikan dan dunia kerja menjadi isu strategis yang terus mendapat perhatian (Cahyani et al., 2023). Konsep link and match menekankan pentingnya kesesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja agar tidak terjadi kesenjangan kompetensi (Shin & Bills, 2021). Ketidaksesuaian tersebut dapat berdampak pada rendahnya kesiapan kerja lulusan serta terbatasnya daya saing tenaga kerja nasional (Kemnaker, 2025). Oleh karena itu, pendidikan menengah kejuruan dituntut untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis kompetensi kerja yang mengacu pada standar nasional maupun standar industri (Rehatalanit et al., 2024).

MGMP Akuntansi Jakarta Timur II merupakan forum profesional yang mewadahi guru akuntansi dari beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Jakarta Timur. Kegiatan pengabdian ini melibatkan 12 guru akuntansi sebagai peserta yang mewakili sekolah anggota MGMP. Berdasarkan hasil observasi awal, wawancara dengan pengurus MGMP, dan diskusi dengan peserta sebelum pelaksanaan kegiatan, ditemukan bahwa pemahaman guru mengenai implementasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 264 Tahun 2023 masih belum merata. Sebagian besar guru telah mengetahui keberadaan SKKNI sebagai acuan kompetensi kerja, namun belum memahami secara komprehensif struktur standar yang meliputi unit kompetensi, elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, dan level okupasi bidang akuntansi (Kurnia et al., 2025). Selain itu, guru juga mengalami kesulitan dalam menerjemahkan unit kompetensi SKKNI ke dalam perangkat pembelajaran, seperti penyusunan capaian pembelajaran, modul ajar, strategi pembelajaran, dan asesmen berbasis kompetensi kerja (Safri dkk., 2026). Hasil diskusi juga menunjukkan bahwa belum pernah dilaksanakan pendampingan yang secara khusus membahas implementasi SKKNI Nomor 264 Tahun 2023 dalam pembelajaran akuntansi sehingga setiap sekolah masih mengembangkan perangkat pembelajaran berdasarkan pemahaman masing-masing.

Kondisi tersebut menyebabkan implementasi pembelajaran akuntansi di sekolah masih berorientasi pada pendekatan akademik dan belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Perbedaan pemahaman guru terhadap standar kompetensi kerja juga menimbulkan variasi kedalaman materi, capaian pembelajaran, dan standar kompetensi antar sekolah. Akibatnya, belum terdapat keseragaman dalam penyusunan perangkat ajar maupun implementasi pembelajaran berbasis kompetensi kerja di lingkungan MGMP Akuntansi Jakarta Timur II (Siswanti et al., 2024). Apabila penyelarasan pembelajaran berbasis SKKNI tidak segera dilakukan, maka potensi terjadinya ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri akan semakin besar. Selain berdampak pada rendahnya kesiapan peserta didik dalam menghadapi sertifikasi kompetensi, kondisi tersebut juga dapat menyebabkan lemahnya kesiapan kerja lulusan, kurang relevannya perangkat ajar dengan kebutuhan industri (Cahaya et al., 2025), serta munculnya perbedaan standar kompetensi antar sekolah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat upaya penguatan *link and match* antara pendidikan vokasi dan dunia kerja.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pendampingan dari perguruan tinggi dalam membantu guru menerjemahkan SKKNI ke dalam pembelajaran yang aplikatif dan kontekstual (Dewi Dyah Widyastuti et al., 2025). Kolaborasi antara perguruan tinggi dan MGMP sangat penting dalam mendukung implementasi pembelajaran berbasis kompetensi serta penguatan ekosistem pendidikan vokasi berbasis industri. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pendampingan yang bersifat partisipatif dan kolaboratif guna meningkatkan pemahaman guru terhadap SKKNI (Risya et al., 2026), memfasilitasi penyusunan kesepakatan level okupasi, serta menghasilkan rekomendasi penyelarasan pembelajaran akuntansi berbasis standar kompetensi kerja nasional. Sebagai upaya menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah telah menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai acuan pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan asesmen berbasis kompetensi. SKKNI Nomor 264 Tahun 2023 pada bidang akuntansi merupakan pembaruan standar kompetensi yang menekankan pendekatan berbasis okupasi dan level kompetensi kerja (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2023). Penerapan standar ini diharapkan mampu meningkatkan relevansi pendidikan akuntansi dengan kebutuhan dunia kerja serta memperkuat kesiapan lulusan dalam menghadapi kompetensi dan persaingan pasar tenaga kerja (Safri, Setiadi, Siswanti et al., 2024).

Kurikulum berbasis kompetensi menitikberatkan pada pencapaian hasil belajar yang berorientasi pada kemampuan kerja nyata yang dapat diaplikasikan dalam dunia profesional. Dalam

pendekatan ini, proses pembelajaran dirancang berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan serta diselaraskan dengan kebutuhan industri agar lulusan memiliki kesiapan kerja yang optimal (Mulder, 2019). Tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan, kurikulum ini juga mengintegrasikan keterampilan praktis dan sikap kerja sebagai satu kesatuan capaian pembelajaran. Lebih lanjut, implementasi kurikulum berbasis kompetensi menuntut adanya perencanaan pembelajaran yang sistematis, penggunaan metode pembelajaran yang kontekstual, serta evaluasi yang mengukur ketercapaian kompetensi secara autentik. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki daya saing tinggi dan relevansi dengan tuntutan dunia kerja.

Teori terapan dalam kegiatan ini adalah implementasi SKKNI No. 264 Tahun 2023 (BNSP, 2023), sebagai standar kompetensi bidang akuntansi. SKKNI berfungsi sebagai, acuan pengembangan kurikulum, dasar penyusunan perangkat ajar, dan standar asesmen kompetensi. Konsep level okupasi dalam SKKNI menjadi dasar penentuan tingkat kompetensi peserta didik. Dalam kegiatan ini, Level II dipilih sebagai standar minimal kompetensi akuntansi berdasarkan kesepakatan MGMP. Implementasi SKKNI dalam pembelajaran di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan, sebagian besar sekolah menengah masih mengacu pada Kurikulum 2013 yang berorientasi pada capaian akademik dan belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi kerja. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan standar kompetensi nasional dengan praktik pembelajaran di sekolah. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, maka potensi ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri akan semakin besar (Murvan Awaludin et al., 2024). Musyawarah Guru Mata Pelajaran memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan tersebut. MGMP merupakan komunitas profesional guru yang berfungsi sebagai wadah kolaborasi, koordinasi, serta pengembangan kompetensi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran (Najri & Jambi, 2020). Melalui MGMP guru dapat berbagi praktik baik, menyusun perangkat ajar bersama, serta menyelaraskan implementasi kurikulum di berbagai sekolah. Peran MGMP menjadi semakin penting dalam konteks transformasi pendidikan vokasi yang menuntut integrasi standar kompetensi kerja ke dalam pembelajaran (Safri, Setiadi, Siswanti et al., 2024).

Hasil diskusi awal dengan MGMP ditemukan bahwa sebagian besar guru belum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai struktur, unit kompetensi, serta level okupasi dalam SKKNI Nomor 264 Tahun 2023. Selain itu, belum terdapat kesepakatan bersama mengenai level okupasi yang akan dijadikan acuan dalam pembelajaran akuntansi. Kondisi ini menyebabkan perbedaan standar kompetensi, kedalaman materi, serta capaian pembelajaran antar sekolah (Safri & Wijayanti, 2024). Permasalahan lain yang diidentifikasi adalah belum optimalnya pendampingan dari perguruan tinggi dalam membantu guru menerjemahkan SKKNI ke dalam perangkat ajar dan asesmen berbasis kompetensi. Padahal, kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), khususnya dalam memperkuat sinergi antara pendidikan tinggi, pendidikan menengah, dan dunia kerja (Muhammad Hadi Widanto et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk meningkatkan pemahaman guru MGMP Akuntansi Jakarta Timur II mengenai SKKNI Nomor 264 Tahun 2023, khususnya terkait struktur SKKNI, unit kompetensi, elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, dan level okupasi bidang akuntansi. Memfasilitasi penyusunan kesepakatan level okupasi pembelajaran akuntansi berbasis SKKNI yang ditandai dengan tersusunnya dokumen kesepakatan penetapan Level II sebagai standar okupasi minimal pembelajaran akuntansi pada MGMP Akuntansi Jakarta Timur II. Serta menghasilkan rekomendasi penyelarasan pembelajaran akuntansi berbasis standar industri yang diwujudkan dalam rekomendasi perangkat ajar dan asesmen berbasis kompetensi kerja sesuai SKKNI Nomor 264 Tahun 2023.

II. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini bersifat partisipatif dan kolaboratif, yaitu suatu pendekatan yang menekankan keterlibatan aktif mitra pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya proses pertukaran pengetahuan secara dua arah antara fasilitator dan mitra, sehingga tidak hanya terjadi transfer ilmu, tetapi juga pengayaan pengalaman berbasis praktik. Selain itu, keterlibatan aktif mitra turut meningkatkan rasa memiliki (*sense of*

ownership) terhadap program yang dijalankan, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan implementasi program di masa mendatang. Pendekatan ini dipilih agar proses pendampingan tidak hanya bersifat transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang diskusi, refleksi, dan penyusunan solusi bersama terkait implementasi SKKNI dalam pembelajaran akuntansi. Kegiatan dilaksanakan secara luring pada bulan 15 November 2025 di Aula Hercules Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Peserta kegiatan berjumlah 12 guru yang tergabung dalam MGMP Akuntansi Jakarta Timur II dan berasal dari beberapa sekolah menengah kejuruan (SMK) di wilayah Jakarta Timur.

Pelaksanaan kegiatan dirancang dalam bentuk *workshop*, *focus group discussion* (FGD), dan pendampingan teknis yang dilaksanakan secara bertahap selama kegiatan berlangsung. Narasumber terdiri dari dosen perguruan tinggi dan praktisi yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi, pendidikan vokasi, dan implementasi SKKNI. Melalui kombinasi metode *workshop* yang bersifat aplikatif dan FGD yang mendorong diskusi reflektif, diharapkan guru tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual, tetapi juga mampu mengaplikasikan kompetensi tersebut secara kontekstual dalam praktik pembelajaran di kelas. Narasumber berperan dalam memberikan materi, memfasilitasi diskusi, serta mendampingi peserta dalam penyusunan rekomendasi pembelajaran berbasis kompetensi kerja. Sementara itu, peserta berperan aktif dalam diskusi, identifikasi permasalahan pembelajaran, pemetaan unit kompetensi, dan penyusunan kesepakatan level okupasi.



Gambar 1. Kegiatan PKM

Subjek kegiatan adalah 12 guru MGMP Akuntansi Jakarta Timur II yang berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah Jakarta Timur. Lokasi kegiatan dilaksanakan secara luring di Aula Hercules Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, melalui kegiatan *Workshop* dan FGD, Diskusi kelompok, dan Pendampingan teknis. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui lima tahapan utama, tahap awal dilakukan melalui observasi dan diskusi dengan pengurus MGMP Akuntansi Jakarta Timur II untuk mengidentifikasi kondisi awal pembelajaran akuntansi, tingkat pemahaman guru terhadap SKKNI, serta kendala implementasi pembelajaran berbasis kompetensi kerja di sekolah. Perencanaan Materi dan Program Pendampingan dimana tim pelaksana menyusun materi kegiatan yang meliputi: konsep dasar SKKNI nomor 264 tahun 2023, struktur unit kompetensi dan elemen kompetensi, level okupasi bidang akuntansi, penyelarasan pembelajaran berbasis kompetensi kerja, dan penyusunan asesmen berbasis kompetensi. Dilanjutkan dengan pelaksanaan *Workshop* dan *Focus Group Discussion* (FGD) dan pendampingan teknis tim pelaksana mendampingi peserta dalam memetakan unit kompetensi SKKNI ke dalam perangkat pembelajaran, termasuk penyelarasan materi ajar dan asesmen berbasis kompetensi kerja. Terakhir evaluasi dan Tindak Lanjut dilakukan melalui observasi partisipasi peserta, diskusi reflektif, dan penyebaran kuesioner evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman dan kepuasan peserta terhadap kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi tindak lanjut program pendampingan berbasis SKKNI.

Tabel 1. Daftar Unit Kompetensi SKKNI 264 Tahun 2023

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.69PTA00.001.3	Memproses Entri Jurnal
2	M.69PTA00.002.1	Mengelola Akun Dalam Laporan Keuangan
3	M.69PTA00.003.3	Memproses Buku Besar
4	M.69PTA00.004.3	Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal untuk Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
5	M.69PTA00.005.3	Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal untuk Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Akuntansi
6	M.69PTA00.006.1	Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal untuk Keseluruhan Skala Usaha
7	M.69PTA00.007.3	Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian
8	M.69PTA00.008.3	Melakukan Komunikasi yang Efektif
9	M.69PTA00.009.3	Menganalisis Informasi Keuangan
10	M.69PTA00.010.3	Menganalisis Informasi Akuntansi Manajemen
11	M.69PTA00.011.3	Mengevaluasi Informasi Penganggaran
12	M.69PTA00.012.1	Menyajikan Informasi-Informasi Terkait Pengambilan Keputusan
13	M.69PTA00.013.1	Melakukan Pemenuhan Kewajiban Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
14	M.69PTA00.014.3	Melakukan Pemenuhan Kewajiban Pajak Wajib Pajak Badan
15	M.69PTA00.015.1	Mengelola Kewajiban Pajak Lainnya
16	M.69PTA00.016.1	Memberikan Dukungan Penilaian Risiko
17	M.69PTA00.017.1	Melakukan Pekerjaan Penanganan Risiko
18	M.69PTA00.018.1	Memberikan Dukungan Penyusunan Laporan Auditor Independen

Sumber: Kep. Menteri Ketenagakerjaan No: 264 Tahun 2023(BNSP, 2023)

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan ini dilakukan secara komprehensif dengan memanfaatkan berbagai metode untuk memperoleh informasi yang valid dan mendalam. Pertama, observasi partisipatif digunakan untuk mengamati secara langsung keterlibatan peserta selama proses pendampingan berlangsung, sehingga peneliti dapat memahami dinamika interaksi, tingkat partisipasi, serta respons peserta terhadap materi yang disampaikan. Kedua, diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion* atau FGD) dilakukan guna menggali pandangan, pengalaman, serta masukan dari para peserta secara lebih mendalam melalui proses interaksi dan pertukaran ide secara terstruktur. Ketiga, kuesioner evaluasi peserta digunakan sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pemahaman, kepuasan, serta persepsi peserta terhadap pelaksanaan kegiatan pendampingan. Instrumen ini memungkinkan pengumpulan data secara kuantitatif yang dapat dianalisis untuk melihat kecenderungan umum dari respon peserta. Keempat, dokumentasi kegiatan dimanfaatkan sebagai data pendukung yang meliputi catatan, foto, serta dokumen terkait lainnya untuk memperkuat hasil temuan serta memberikan bukti empiris atas pelaksanaan kegiatan. Dengan kombinasi keempat teknik tersebut, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan akurat mengenai efektivitas kegiatan pendampingan yang dilaksanakan.

Teknik analisis data dalam kegiatan ini dilakukan dengan mengombinasikan pendekatan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan kegiatan. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengolah data yang berasal dari hasil diskusi dan rekomendasi peserta, khususnya yang diperoleh melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola, tema, serta makna yang muncul dari interaksi dan pandangan peserta terkait pelaksanaan pendampingan. Sementara itu, analisis deskriptif kuantitatif diterapkan pada data yang diperoleh dari kuesioner evaluasi peserta, yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman, kepuasan, dan persepsi peserta secara numerik. Hasil analisis kuantitatif ini kemudian disajikan dalam bentuk persentase atau kecenderungan nilai tertentu untuk memudahkan interpretasi data. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan objektif mengenai tingkat keberhasilan serta efektivitas kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan.

III. HASIL DAN DISKUSI

III.1 Hasil

Kegiatan pendampingan penyelarasan pembelajaran akuntansi berbasis SKKNI No. 264 Tahun 2023 dilaksanakan melalui rangkaian workshop, diskusi kelompok terarah (FGD), dan pendampingan teknis kepada guru MGMP Akuntansi Jakarta Timur II. Kegiatan ini melibatkan 12 peserta guru akuntansi yang berasal dari berbagai sekolah menengah di wilayah Jakarta Timur. Pelaksanaan kegiatan

dirancang secara partisipatif sehingga peserta tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi terlibat aktif dalam diskusi, berbagi pengalaman, serta merumuskan solusi bersama. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *professional learning community* yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengembangan profesional guru.

Tahap analisis kebutuhan dilakukan melalui diskusi awal bersama pengurus MGMP Akuntansi Jakarta Timur II dan peserta kegiatan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting pembelajaran akuntansi di sekolah. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa pemahaman guru terhadap Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 264 Tahun 2023 masih terbatas, khususnya terkait struktur kompetensi, level okupasi, dan implementasinya dalam pembelajaran. Selain itu, proses pembelajaran akuntansi di sebagian sekolah masih berorientasi pada Kurikulum 2013 yang lebih menekankan aspek akademik dan belum sepenuhnya mengintegrasikan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi kerja.

Unit kompetensi yang diimplementasikan dalam pembelajaran dirancang untuk membekali peserta didik dengan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri serta mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Kompetensi tersebut meliputi kemampuan memproses entri jurnal, mengelola akun dalam laporan keuangan, melakukan posting ke buku besar, menyusun laporan keuangan entitas tunggal skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer akuntansi, serta menerapkan komunikasi yang efektif di lingkungan kerja. Melalui pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dan mencatat transaksi berdasarkan prinsip debit dan kredit, mengelola akun secara sistematis, serta menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), sekaligus memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengolahan data akuntansi.

Selain penguasaan kompetensi teknis, implementasi pembelajaran juga menekankan pentingnya pengembangan kompetensi nonteknis, khususnya kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan. Keterampilan komunikasi berperan penting dalam memperlancar koordinasi, pengelolaan dokumen transaksi, serta meminimalkan kesalahan dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Pembelajaran tidak hanya menghasilkan peserta didik yang kompeten dalam bidang akuntansi, tetapi juga memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta kesiapan kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha.

Tabel 2. Pemetaan Hasil Diskusi Kelompok Unit Kompetensi Okupasi Level II

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI	Memahami
1	2	3	Jenjang 2
1	M.69PTA00.001.3	Memproses Entri Jurnal	✓
2	M.69PTA00.002.1	Mengelola Akun Dalam Laporan Keuangan	✓
3	M.69PTA00.003.3	Memproses Buku Besar	✓
4	M.69PTA00.004.3	Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal untuk Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	✓
5	M.69PTA00.005.3	Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal untuk Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Akuntansi	✓
8	M.69PTA00.008.3	Melakukan Komunikasi yang Efektif	✓

Sumber: Hasil Diskusi

Hasil pelaksanaan workshop dan *Focus Group Discussion* (FGD) menunjukkan adanya peningkatan pemahaman guru terhadap Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang akuntansi, terutama mengenai struktur SKKNI yang terdiri atas unit kompetensi, elemen kompetensi, dan kriteria unjuk kerja sebagai dasar penyusunan pembelajaran berbasis kompetensi. Selain itu, guru semakin mampu mengidentifikasi unit dan elemen kompetensi yang relevan untuk diterjemahkan ke dalam capaian pembelajaran serta perangkat ajar yang kontekstual sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Peningkatan pemahaman juga terlihat pada aspek kriteria unjuk kerja, di mana guru mulai memahami

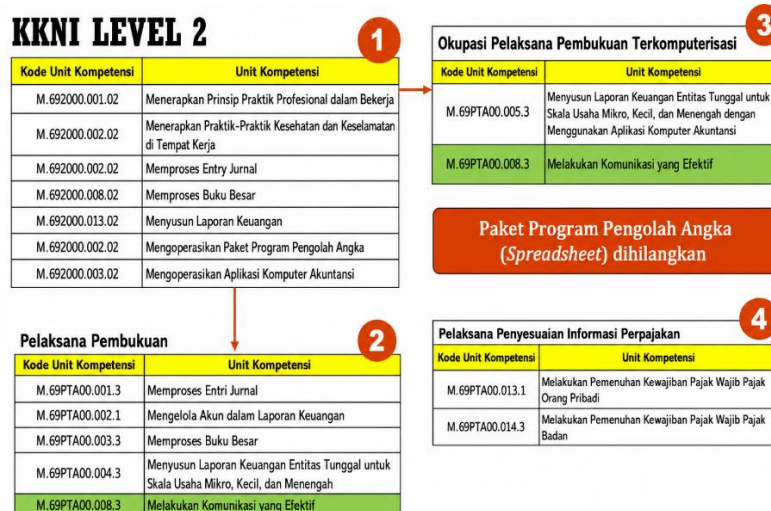
bahwa asesmen pembelajaran perlu mengukur tidak hanya penguasaan teori, tetapi juga kemampuan praktik dan performa kerja peserta didik sesuai standar kompetensi. Di samping itu, peserta memperoleh pemahaman mengenai konsep level okupasi pada bidang akuntansi dan keterkaitannya dengan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja, dengan hasil diskusi yang menunjukkan kesepahaman bahwa Level II merupakan standar okupasi yang paling sesuai untuk diterapkan pada pembelajaran akuntansi di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan.

Tabel 3. Korespondensi Level KKNi dengan Taksonomi Bloom

Level KKNi	Ranah Kognitif (Pengetahuan)	Ranah Afektif (Sikap)	Ranah Psikomotorik (Keterampilan)
Level 1-3	Fokus pada kemampuan Mengingat (C1) dan Memahami (C2) fakta dan prosedur dasar.	Menunjukkan sikap dasar seperti menerima, menanggapi, dan menghargai nilai-nilai yang sederhana.	Fokus pada keterampilan dasar seperti meniru gerakan (imitasi) dan melakukan gerakan dasar (manipulasi).
Level 4	Mencakup Menerapkan (C3) pengetahuan dan keterampilan pada tugas yang spesifik dan kontekstual.	Menunjukkan sikap bertanggung jawab pada pekerjaan mandiri dengan batasan tertentu.	Mampu melakukan tugas dengan presisi dan koordinasi yang lebih baik (presisi).
Level 5-6	Mencapai kemampuan Menganalisis (C4) informasi dan data.	Menginternalisasi nilai-nilai dan menunjukkan sikap yang terorganisir dalam bekerja.	Keterampilan mulai terotomatisasi dan mampu mengadaptasi gerakan sesuai situasi (artikulasi/naturalisasi).
Level 7-8	Melibatkan kemampuan Mengevaluasi (C5) solusi dan proses kerja secara kritis.	Memiliki sikap kepemimpinan, tanggung jawab, dan etika profesi yang tinggi.	Mampu menghasilkan gerakan atau tindakan baru yang inovatif (naturalisasi/kreasi).
Level 9	Mencapai level tertinggi: Menciptakan (C6) ide, metode, atau solusi baru melalui riset multidisiplin.	Menguasai filosofi keilmuan dan menjunjung tinggi etika akademik serta integritas profesional.	Menciptakan metode atau teknik baru dalam bidang keahliannya.

Sumber: <https://enggar.net/2016/06/kata-kerja-operasional-baru-taksonomi-bloom/>

Peserta juga menunjukkan peningkatan pemahaman dalam mengintegrasikan kompetensi kerja ke dalam pembelajaran. Guru mulai memahami pentingnya penyelarasan materi ajar, metode pembelajaran, dan asesmen berbasis kompetensi kerja agar pembelajaran akuntansi menjadi lebih aplikatif, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.



Gambar 2. Level II SKKNI dalam Okupasi

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh peserta terhadap narasumber menyatakan semua sangat baik artinya peserta sangat puas dengan penyampaian materi narasumber mulai dari materi, cara penguasaan materi, teknik penyampaian serta kemampuan dalam menjawab pertanyaan.

Tabel 4. Hasil Evaluasi Narasumber

No	Narasumber	Kurang Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
1	Penyampaian materi	4,4%	8,7%	13%	73,9%
2	Penguasaan materi	0%	4,4%	9%	86,6%
3	Teknik penyampaian materi	4,4%	8,7%	13%	73,9%
4	Menjawab pertanyaan	0%	4,3%	17,4%	78,3%

Hal ini menunjukkan efektivitas pendekatan pelatihan dan pendampingan dalam meningkatkan kapasitas profesional guru. Peningkatan pemahaman ini tercermin dari partisipasi aktif peserta dalam diskusi dan kemampuan guru dalam mengidentifikasi kompetensi yang relevan dengan pembelajaran akuntansi. Hasil evaluasi kepuasan peserta menunjukkan bahwa mayoritas peserta memberikan penilaian sangat baik.

Salah satu luaran utama kegiatan ini adalah tercapainya kesepakatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk menetapkan Level II sebagai standar okupasi minimal dalam pembelajaran akuntansi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kesepakatan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu kesesuaian Level II dengan kemampuan peserta didik yang telah mampu menguasai kompetensi dasar teknis akuntansi pada tingkat *entry level*, kesiapan sekolah yang masih berada pada tahap awal implementasi pembelajaran berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), serta kebutuhan dunia usaha dan dunia industri terhadap tenaga kerja dengan kompetensi administrasi dan teknis akuntansi dasar. Penetapan Level II dinilai sebagai pilihan yang realistis untuk diterapkan secara bertahap sesuai dengan kesiapan perangkat pembelajaran, sarana praktik, dan kompetensi guru, sekaligus mampu meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja serta mendukung kesiapan peserta didik dalam menghadapi sertifikasi kompetensi kerja.

Kesepakatan ini memiliki implikasi penting sebagai berikut: Pertama, kesepakatan tersebut menciptakan keseragaman standar kompetensi antar sekolah sehingga terdapat acuan bersama dalam menentukan capaian pembelajaran dan kedalaman materi ajar. Keseragaman ini penting untuk mengurangi perbedaan standar pembelajaran antar sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara lebih merata. Kedua, penetapan level okupasi menjadi dasar dalam penyusunan perangkat ajar berbasis kompetensi kerja, termasuk modul ajar, asesmen, dan kegiatan praktik pembelajaran. Dengan adanya acuan level kompetensi yang jelas, guru dapat menyusun pembelajaran yang lebih terstruktur, terukur, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Ketiga, kesepakatan tersebut mendukung implementasi kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan keterkaitan antara pembelajaran di sekolah dengan standar kompetensi kerja nasional. Melalui pendekatan ini, pembelajaran akuntansi tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga pada pengembangan keterampilan kerja yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Penetapan level okupasi ini merupakan implementasi konkret dari teori kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pencapaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi kerja. Melalui kegiatan ini dihasilkan rekomendasi penyelarasan pembelajaran akuntansi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yang meliputi penyelarasan perangkat ajar dengan unit kompetensi SKKNI, pengembangan asesmen berbasis kompetensi kerja, integrasi studi kasus dunia kerja dalam proses pembelajaran, serta penguatan pembelajaran kontekstual. Rekomendasi tersebut bertujuan agar capaian pembelajaran, materi ajar, modul, dan aktivitas praktik selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, didukung oleh asesmen autentik yang mengukur aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja secara komprehensif. Selain itu, penerapan studi kasus dan pembelajaran kontekstual melalui simulasi maupun praktik kerja diharapkan mampu meningkatkan kemampuan analisis, pemecahan masalah, serta kesiapan kerja peserta didik, sehingga implementasi konsep *link and match* antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri dapat terwujud secara lebih optimal.

Kegiatan ini memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sebagai mitra strategis dalam pengembangan pendidikan vokasi. Kolaborasi tersebut mendorong terjadinya transfer pengetahuan melalui workshop, *Focus Group Discussion* (FGD), dan pendampingan teknis yang memberikan pemahaman kepada guru mengenai implementasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), penyelarasan pembelajaran berbasis kompetensi, serta pengembangan asesmen berbasis kompetensi kerja. Dampak dari kolaborasi ini adalah meningkatnya kualitas pembelajaran akuntansi melalui penyusunan perangkat ajar, pengembangan asesmen, dan

integrasi kompetensi kerja yang lebih sistematis, kontekstual, dan selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, sehingga tercipta kemitraan yang berkelanjutan dalam membangun ekosistem pendidikan vokasi yang kolaboratif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan industri.

Kolaborasi antara perguruan tinggi dan sekolah melalui MGMP menunjukkan pentingnya kemitraan antar lembaga pendidikan dalam mendukung pengembangan pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Kemitraan ini tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan dan penguatan kompetensi guru terkait implementasi SKKNI dan pembelajaran berbasis kompetensi kerja, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif. Selain itu, kolaborasi tersebut turut mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan mitra. Dengan adanya sinergi yang berkelanjutan, perguruan tinggi dan MGMP dapat bersama-sama membangun ekosistem pendidikan vokasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan relevan dengan perkembangan dunia usaha dan dunia industri.

III.2 . Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif melalui workshop, *focus group discussion* (FGD), dan pendampingan teknis efektif dalam meningkatkan pemahaman guru terhadap implementasi SKKNI Nomor 264 Tahun 2023 dalam pembelajaran akuntansi. Keterlibatan aktif peserta selama kegiatan menunjukkan bahwa model pendampingan kolaboratif mampu mendorong terjadinya proses pembelajaran profesional secara kolektif di lingkungan MGMP. Temuan ini sejalan dengan konsep *professional learning community* (PLC) yang menekankan pentingnya kolaborasi dan refleksi bersama dalam meningkatkan kompetensi profesional guru (Najri, 2020).

Peningkatan pemahaman guru mengenai unit kompetensi, elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, dan level okupasi menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan berbasis praktik lebih efektif dibandingkan sosialisasi yang bersifat satu arah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Tshiovhe et al. (2024) yang menyatakan bahwa penguatan kompetensi guru vokasi perlu dilakukan melalui pelatihan yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung konsep *competency-based education* (CBE) yang menekankan pentingnya penyelarasan pembelajaran dengan kompetensi kerja yang terukur dan sesuai kebutuhan industri (Mulder, 2019). Kesepakatan penetapan Level II sebagai standar okupasi minimal pembelajaran akuntansi menjadi salah satu luaran strategis kegiatan. Kesepakatan ini tidak hanya menciptakan keseragaman standar kompetensi antar sekolah, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan perangkat ajar dan asesmen berbasis kompetensi kerja. Temuan ini memperkuat konsep *link and match* yang menekankan pentingnya keselarasan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (Shin & Bills, 2021). Dengan adanya penyelarasan tersebut, pembelajaran akuntansi diharapkan menjadi lebih kontekstual, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan kerja pada bidang teknis akuntansi tingkat entry level.

Dibandingkan dengan kegiatan pengabdian sebelumnya yang dilakukan oleh Safri dan Wijayanti (2024), kegiatan ini memiliki kontribusi yang lebih spesifik pada aspek penyelarasan pembelajaran berbasis SKKNI dan penetapan level okupasi pembelajaran akuntansi. Jika kegiatan sebelumnya lebih berfokus pada penguatan kompetensi penggunaan aplikasi akuntansi, maka kegiatan ini menitikberatkan pada transformasi pembelajaran berbasis standar kompetensi kerja nasional. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi tambahan dalam pengembangan model pendampingan implementasi SKKNI pada pendidikan vokasi.

Keberlanjutan program menjadi aspek penting dalam mendukung implementasi pembelajaran berbasis SKKNI secara berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut kegiatan, MGMP Akuntansi Jakarta Timur II berencana menyusun perangkat ajar dan asesmen berbasis kompetensi kerja secara kolaboratif antar sekolah. Selain itu, perguruan tinggi akan melanjutkan program pendampingan melalui pelatihan lanjutan terkait pengembangan modul ajar, asesmen kompetensi, dan implementasi pembelajaran berbasis industri. Keberlanjutan kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan mendukung peningkatan kualitas lulusan SMK bidang akuntansi

Implementasi SKKNI No. 264 Tahun 2023 dalam proses pembelajaran menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung konsep *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Standar kompetensi yang terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran memungkinkan peserta didik memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kesepakatan penggunaan Level II sebagai acuan kompetensi menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan capaian pembelajaran dengan standar dunia kerja, sehingga dapat meminimalisasi kesenjangan kompetensi lulusan. Hal ini penting mengingat tantangan globalisasi dan dinamika pasar kerja yang menuntut lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga kompetensi praktis yang terukur.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan ini menunjukkan bahwa model pendampingan berbasis kolaborasi dan partisipasi aktif mampu menjadi strategi yang efektif dalam mendorong transformasi pembelajaran berbasis kompetensi kerja. Keberhasilan ini tidak hanya ditunjukkan melalui peningkatan pemahaman guru terhadap SKKNI, tetapi juga melalui perubahan praktik pembelajaran yang lebih kontekstual, aplikatif, dan berorientasi pada kebutuhan industri. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat direkomendasikan sebagai model pengembangan profesional guru yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pendampingan penyelarasan pembelajaran akuntansi berbasis SKKNI Nomor 264 Tahun 2023 pada MGMP Akuntansi Jakarta Timur II telah dilaksanakan melalui workshop, focus group discussion (FGD), dan pendampingan teknis secara partisipatif. Berdasarkan hasil evaluasi peserta dan proses diskusi selama kegiatan berlangsung, program menunjukkan respons positif dalam meningkatkan pemahaman guru mengenai unit kompetensi, elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, serta level okupasi dalam SKKNI bidang akuntansi.

Kegiatan ini juga menghasilkan dokumen kesepakatan penetapan Level II sebagai standar okupasi minimal pembelajaran akuntansi pada MGMP Akuntansi Jakarta Timur II. Selain itu, kegiatan menghasilkan rekomendasi awal penyelarasan perangkat ajar dan asesmen berbasis kompetensi kerja yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan pembelajaran berbasis SKKNI di sekolah.

Melalui kegiatan ini, kolaborasi antara perguruan tinggi dan MGMP turut memperkuat sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi pendidikan vokasi yang lebih selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Dengan demikian kegiatan PKM ini memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kompetensi profesional guru akuntansi dan menjadi langkah awal yang strategis dalam penerapan pembelajaran akuntansi berbasis standar kompetensi kerja nasional secara berkelanjutan di lingkungan MGMP Akuntansi Jakarta Timur II.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala MGMP Akuntansi Jakarta Timur II beserta seluruh pengurus yang telah melakukan kerja sama sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta yang telah memberikan dukungan pendanaan sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahaya, Y. F., Pujiati, H., Isnanto, S. H., Yosepha, S. Y., Widana, I. D. K. K., Pamcasasti, R., Sidapung, T. O., Faisal, A., & Siladjadja, M. (2025). Sosialisasi Informasi Manajemen Administrasi Kelurahan Halim Perdanakusuma. *Jurnal Bakti Dirgantara*, 2(2), 90–95. <https://doi.org/10.35968/m7r85388>
- Cahyani, C. A., Mudzanatun, M., Miyono, N., & Riskiyati, N. (2023). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 4726–4732.
- Dewi Dyah Widyastuti, Juhaeti, Rita Intan Permatasari, Novita Damayanti, Sipon Al Munir, Rio Afrianda, Abdullah Fathoni, Siska Ardini, Raka Arbian Fallah, & Firna Julia Salim. (2025). Sosialisasi Coretax System Membantu Meningkatkan Pemahaman Kepada Dosen Anggota AFEBSI Jakarta. *Jurnal Bakti Dirgantara*, 2(2), 124–129. <https://doi.org/10.35968/74xsjk67>
- Kemnaker. (2025). Analisis dan Mitigasi Risiko Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi untuk Optimalisasi School to Work Transition.

- Kurnia, J., Betesda, Dimpo Sinaga, Alcianno Ghobadi, Tata Sumitra, & Muryan Awaludin. (2025). Pelatihan Teknologi Berbasis Multimedia Untuk Meningkatkan Kompetensi Siswa SMK Muhammadiyah 15 Jakarta. *Jurnal Bakti Dirgantara*, 2(2), 116–123. <https://doi.org/10.35968/j44qvn80>
- Mulder, M. (2019). Foundations of Competence-Based Vocational Education and Training. *Handbook of Vocational Education and Training*, 1167–1192. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94532-3_65
- Muhammad Hadi Widanto, Muhamad Jayadi, Riskha Agustianingsih, Rafika Arum Sari, & Budi Aji Warsiyanto. (2024). Pelatihan Proses Manufaktur Material Komposit dalam Meningkatkan
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2023). Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Hukum dan Akuntansi Bidang Teknisi Akuntansi. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- Keterampilan Siswa SMKN 4 Depok untuk Penyelarasan Pendidikan dengan Tren Industri. *Jurnal Bakti Dirgantara*, 1(2), 20–27. <https://doi.org/10.35968/36512c82>
- Muryan Awaludin, Tata Sumitra, & Achmad Ramadhany. (2024). Pendampingan Uji Kompetensi Keahlian Multimedia Dan Teknik Komputer Jaringan Pada SMK Bina Putra Mandiri – Bogor. *Jurnal Bakti Dirgantara*, 1(1), 39–47. <https://doi.org/10.35968/njqcf086>
- Najri, P. (2020). MGMP Dalam Meningkatkan Keprofesionalan Guru Mata Pelajaran. 10(Juni), 130–144.
- Rehatalanit, Y. L. R., Peniarsih, Awaludin, M., Purwanto, H., Longdong, M. P. E., & Achmad Ramadhany. (2024). Pembelajaran Teknologi Informasi (Aplikasi Canva Melalui Android Dan Laptop) Kepada Siswa Pondok Pesantren Nurul Muta'Allimin. *Jurnal Bakti Dirgantara*, 1(1), 68–82. <https://doi.org/10.35968/fjzbnk745>
- Risyda, F., Gardenia, Y., Lucia, Y., Rehatalanit, R., Awaludin, M., Sumitra, T., Mantik, H., Informatika, M., Dirgantara, U., Suryadarma, M., Informasi, S., & Marsekal, U. D. (2026). Peningkatan Literasi Digital dan Pelatihan Dasar Penggunaan Aplikasi Microsoft Office Anggota TP PKK Kelurahan Sukmajaya. *Jurnal Bakti Dirgantara*, 3(1), 44–50.
- Safri, Dian Wijayanti, Tutik Siswanti, Eneng Sugihyanty, Fatiah Azzahra, L. F. A. (2026). Efektivitas Pelatihan Komputerisasi Akuntansi Menggunakan Aplikasi Accurate Online Terhadap Hasil Ujian Certified Accurate Professional Bagi Guru MGMP Akuntansi Jakarta Timur. *Jurnal Bakti Dirgantara*, 3(1), 1–6.
- Safri, S., & Wijayanti, D. (2024). Bedah Soal USK (Ujian Sertifikasi Kompetensi) Bidang Akuntansi Dengan Menggunakan Aplikasi Accurate Online Untuk Guru MGMP Akuntansi Jakarta Timur II. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 8(3), 1–7. <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v8i3.4066>
- Safri, Setiadi, Siswanti, T., Rani, P., & Asak, A. (2024). Pelatihan Dasar Akuntansi , Perpajakan , dan Komputer Akutansi Kepada. *Jurnal Bakti Dirgantara*, 1(1), 16–23.
- Siswanti, T., Setiadi, S., Safri, S., & Wijayanti, D. (2024). Penyuluhan Edukasi Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Yang Sehat. *Jurnal Bakti Dirgantara*, 1(2), 83–89. <https://doi.org/10.35968/r5q82197>
- Shin, D.-H., & Bills, D. (2021). Trends in Educational and Skill Mismatch in the United States. *Social Sciences*, 10(10), 395. <https://doi.org/10.3390/socsci10100395>
- Tshiovhe, T., Musetha, T., Nenzhelele, M., & Monobe, R. (2024). The mismatch between training and demand of accounting teachers in Limpopo secondary schools. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 13(8), 225–233. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v13i8.3754>